

**IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI DINAS  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN  
GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Khaerul Amri

NPP. 29.1387

*Asdaf Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan*

*Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Email: khaerulamri46@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** This study focuses on the implementation of the village family planning program at the Gowa Regency Population Control and Family Planning Office. **Objective:** This study aims to determine the implementation of the Family Planning Village program in Gowa Regency, obstacles, and efforts to overcome obstacles in the implementation of the Family Planning Village program in Gowa Regency. **Methods:** This study uses qualitative research methods in the form of descriptive with an inductive approach using the Implementation theory of Edward III. Data collection techniques were carried out by conducting interviews, observations and documentation. **Result:** The authors' findings in this study are that the implementation of the family planning village program in Gowa Regency has been going well, it's just that there are still obstacles both from the government and from the community itself.. **Conclusion:** The implementation of the Family Planning Village Program in Gowa Regency is going well, but there are constraints regarding the budget, human resources, and lack of awareness from the community of the importance of the Family Planning program. Budget allocation, improving the quality of human resources, and outreach to the public are the government's efforts to overcome existing obstacles.

**Keywords :** Implementation, Family Planning Village, Gowa Regency Population Control and Family Planning Service

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini berfokus pada permasalahan implementasi program kampung keluarga berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Gowa, hambatan, serta upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Gowa. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif dengan pendekatan induktif dengan menggunakan teori Implementasi dari Edward III. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan penulis dalam penelitian ini yaitu implementasi program kampung keluarga berencana di Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan baik, hanya saja masih terdapat kendala baik dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. **Kesimpulan:** Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Gowa berjalan dengan baik, namun terdapat kendala mengenai anggaran, sumber daya manusia, serta kurangnya kesadaran dari masyarakat betapa pentingnya program Keluarga Berencana. Pengalokasian anggaran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan sosialisasi kepada masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi hambatan yang ada.

**Kata kunci :** Implementasi, Kampung Keluarga Berencana, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan salah satu jumlah penduduk terbanyak di dunia. Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I 2021 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri jumlah penduduk Indonesia, yaitu 272,229,372 jiwa yang terdiri dari laki-laki 137,521,557 jiwa dan perempuan 134,707,815 jiwa. Masalah besar bagi negara – negara di dunia khususnya negara berkembang ialah jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan. Jika suatu pertumbuhan penduduk telah melebihi kapasitas suatu wilayah maka hal itu bisa berdampak pada kualitas kehidupan penduduk di wilayah tersebut. Timbulnya pengangguran, angka

kriminalitas yang tinggi, serta angka harapan hidup yang rendah merupakan beberapa contoh masalah yang akan timbul akibat meningkatnya jumlah penduduk tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitas penduduk.

Laju pertumbuhan penduduk ditentukan oleh tingkat kelahiran dan kematian. Dengan adanya peningkatan pelayanan kesehatan menyebabkan tingkat kematian rendah, sedangkan laju tingkat kelahiran masih tinggi, hal ini merupakan penyebab utama dari meningkatnya jumlah penduduk. Upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, dan untuk mencegah terjadinya ledakan penduduk diperlukan program keluarga berencana yang menjadi salah satu medianya. Selain itu program keluarga berencana merupakan kebutuhan utama keluarga untuk membentuk keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Gowa sendiri diatur dalam Keputusan Bupati Nomor : 336/V/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Dimana dalam rangka menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera diperlukan adanya upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana melalui Revitalisasi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) sebagai penggerak dan fasilitator harus bekerja dengan cepat dalam merealisasikan program yang dirancang untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, dalam hal ini kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) adalah wujud dari pelayanan publik akan tetapi semua pihak harus terlibat dalam program ini, seperti adanya partisipasi oleh masyarakat dan juga dukungan oleh pemerintah Kabupaten Gowa agar program ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang ingin diraih.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Gowa. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala baik dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Misalnya, kendala dari pemerintah yaitu mengenai anggaran, kualitas sumber daya manusia yang sangat kurang dalam pelaksanaan program Kampung KB. Adapun kendala dari Masyarakat yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat betapa pentingnya program KB dan terkesan malu dan takut karena di pikiran masyarakat selalu hanya tentang alat kontrasepsi. Hal ini bila diteruskan maka nanti akan menjadi penghambat keberhasilan Program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Gowa.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari adanya penelitian lain, baik dalam konteks analisis maupun efektivitas. Penelitian Dwi Septina Hidayati yang berjudul *Analisis Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Pojoksari Kabupaten Kendal*. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Kendal dari tahun 2014-2017 yaitu peningkatan jumlah penduduk dari 955.949 jiwa sampai 957.024 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0.85%. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor komunikasi belum berjalan dengan baik, sumber daya yang masih kurang dalam bentuk dana, disposisi yang cenderung positif dan SOP yang belum diketahui dan dibukukan. Penelitian Fitri yang berjudul *Efektivitas Program Keluarga Berencana dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Makassar*. Permasalahan kependudukan dan laju pertumbuhan penduduk masih menjadi masalah yang cukup serius yang dihadapi Kota Makassar dengan jumlah penduduk tertinggi di Sulawesi Selatan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Berencana cukup efektif dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Kota Makassar. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah yang dilakukan sudah berjalan cukup baik dan juga pemahaman dan pengetahuan PUS terhadap program KB juga menunjukkan hasil yang baik.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terdapat pada fokus penelitian penulis yaitu Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, dimana penelitian ini terfokus pada implementasi Program Kampung KB di Kabupaten Gowa guna menciptakan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk demi terciptanya keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera. Sedangkan penelitian terdahulu lebih berfokus pada analisis dan efektivitas program keluarga berencana di masing-masing daerah di wilayah Desa Pojoksari Kabupaten Kendal dan Kota Makassar.

### **1.5. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Gowa yang dijalankan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian ini dilakukan langsung ke sumber data dan instrumen kuncinya yaitu penulis itu sendiri.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara tatap muka langsung dengan informan sebanyak 8 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Kepala Seksi Penyuluhan dan KIE, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), serta Masyarakat sebanyak 3 orang.

Teori yang digunakan untuk menganalisis pada penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut Edward III yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yang saling berhubungan yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa menggunakan pendapat dari Edward III yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yang saling berhubungan yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap implemendor, dan struktur birokrasi. Adapun pembahasannya sebagai berikut:

### **3.1. Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Gowa**

Implementasi merupakan suatu proses atau tahapan dimana sebuah kebijakan atau keputusan harus diterapkan atau dilakukan untuk mencapai tujuan. Teori Implementasi Edward III yang dikutip oleh Budi Winarno (2016:16) menjelaskan bahwa ada empat faktor penting yang dapat mempengaruhi suatu proses kebijakan ketika diterapkan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap implemendor, dan struktur birokrasi.

#### **3.1.1. Komunikasi**

Komunikasi dalam Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana merupakan penyampaian informasi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa selaku pelaksana teknis yang akan berkoordinasi dengan semua instansi yang

terkait untuk percepatan dari pembangunan program Kampung Keluarga Berencana. Pada saat melaksanakan penelitian terkait dengan komunikasi implementasi program kampung keluarga berencana di Kabupaten Gowa ada 3 (tiga) hal penting yang mendorong terjadinya komunikasi yang tidak optimal. Hal ini juga terkait dalam teori komunikasi implementasi Edward III. 3 (tiga) hal penting dalam komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

#### **3.1.1.1. Transmisi**

Faktor pertama yang mempengaruhi komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat mengimplementasikan suatu keputusan, dia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan surat perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Implementasi akan berjalan baik dan lancar apabila tujuan dan sasarannya dipahami oleh setiap individu yang bertanggung jawab dan ikut serta berperan dalam pencapaian kebijakan tersebut. Maka dari itu dapat memudahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan utama kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan ini berkaitan dengan pemahaman dalam mengkomunikasikan standar dan ukuran melalui mekanisme dan prosedur yang memudahkan penyampaiannya. Proses penyampaian atau transmisi terkait dengan Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Gowa yang dimana selaku pelaksana teknis ialah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa salah satunya dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan dengan melaksanakan penyuluhan secara langsung terkait program kampung keluarga berencana dan juga memanfaatkan media yang ada, seperti media elektronik, media online dan juga media cetak agar program kampung keluarga berencana ini dapat dikenal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Gowa.

#### **3.1.1.2. Kejelasan**

Faktor kedua yang dikemukakan oleh Edward III adalah kejelasan. Kejelasan dalam komunikasi kebijakan menurut Edward III ialah hal penting. Apabila kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuknya tidak hanya harus diterima oleh para implementor, tetapi juga komunikasi kebijakannya harus jelas. Sementara untuk kejelasan dari informasi terkait pelaksanaan kampung keluarga berencana yang telah disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa sudah baik dan jelas. Hal tersebut pun dibenarkan pihak Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang telah melaksanakan program kampung keluarga berencana sesuai dengan prosedur serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga

sampai saat ini sangat mendukung seluruh kegiatan-kegiatan yang dibentuk dalam kampung keluarga berencana dengan skala 70% keterlibatan masyarakat.

### **3.1.1.3. Konsistensi**

Konsistensi kebijakan program kampung keluarga berencana ini dapat mendukung keberhasilan suatu kebijakan. Dimana dalam menjalankan programnya melalui pembinaan, serta perlu adanya konsistensi koordinasi oleh Tim Kelompok Kerja/Kader terkait penyelenggaraannya, agar capaian program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana melalui Kampung KB bisa lebih ditingkatkan melalui pencapaian pengguna akseptor baru, kemudian akseptor aktif yang ingin ditingkatkan dan program kelompok kegiatan seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), serta Bina Keluarga Lansia (BKL).

### **3.1.2. Sumber Daya**

Sumber daya merupakan salah satu indikator penting penunjang implementasi suatu kebijakan. Menurut Winarno (2014:184) sumber-sumber yang penting menurut Edward III yaitu sumber daya manusia atau staf yang memadai serta sumber daya finansial yang cukup. Kekurangan sumber daya dalam implementasi akan menimbulkan implementasi yang cenderung kurang efektif. Adanya sumber daya yang cukup diharapkan mampu memperlancar jalannya kebijakan.

#### **3.1.2.1. Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia merupakan implementor dari sebuah kebijakan, sehingga berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh staff ataupun pegawainya. Dalam kegiatan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Gowa ini untuk sumber daya manusianya tidak memiliki kekurangan. Terkait dengan hal tersebut, dalam penyelenggaraan Program Kampung KB di Kabupaten Gowa juga terdapat 8 fungsi keluarga atau Tim Pokja (Kelompok Kerja) yang didalamnya terdapat Pembina, Ketua Pelaksana, Sekretaris, Bendahara dan Kader yang nantinya membantu menyampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan mampu mengelola kegiatan program Kampung KB tersebut

#### **3.1.2.2. Sumber Daya Finansial**

Sumber daya finansial merupakan sumber daya yang melibatkan persoalan tentang dana atau modal awal yang memang sudah direncanakan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu yang

nantinya akan dialokasikan dalam suatu kegiatan. Hasil dari penelitian terkait ketersediaan dana masih belum mencukupi untuk menutupi kegiatan yang ada selama proses Kampung Keluarga Berencana berjalan dikarenakan sumber dana alokasi khusus hanya berasal dari APBD murni itu masih sangat kurang dan selama kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga banyak dibantu melalui alokasi dana desa itu sendiri.

### **3.1.3. Disposisi / Sikap Pelaksana**

Disposisi atau sikap pelaksana tentunya juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Karena apabila sikap implementor baik terhadap suatu kebijakan, hal tersebut berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka akan melakukan kebijakan sesuai dengan keinginan para pembuat kebijakan. Adapun hal penting yang harus diperhatikan dalam disposisi, yaitu Pengangkatan birokrat, haruslah orang-orang yang memiliki kompetensi, integritas, dan loyalitas terhadap kebijakan yang dijalankan.

#### **3.1.3.1. Pengangkatan Birokrat**

Suatu kebijakan dapat terimplementasi jika didukung oleh birokrat yang memiliki kompetensi, integritas, dan loyalitas. Birokrat merupakan tonggak utama dalam suatu birokrasi. Sikap birokrat sangat menentukan bagaimana arah kebijakan tersebut dijalankan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap yang diberikan oleh para implementor itu sendiri menerima sangat baik dengan adanya program Kampung KB ini, karena nantinya dengan adanya Kampung KB ini akan mensejahterakan masyarakat yang ada di Kabupaten Gowa.

#### **3.1.4. Struktur Birokrasi**

Struktur Birokrasi yang bertugas memiliki pengaruh yang signifikan dalam implementasi suatu kebijakan karena perumusan dan penetapan kebijakan dibutuhkan adanya suatu sistem untuk pengimplementasiannya. Edward III dikutip dari Buku Budi Winarno yang berjudul kebijakan publik (teori, proses dan studi kasus) mengatakan bahwa aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya atau Standart Operational Procedure (SOP). Prosedur-prosedur dan ukuran dasar kerja atau Standart Operational Procedure (SOP) yang berasal dari dalam (internal) organisasi berisi standar-standar baku dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang cocok untuk organisasi yang relative tidak menghadapi perubahan drastis. Namun, akan sulit untuk menyesuaikan diri terhadap organisasi yang menghendaki perubahan secara lazim dilakukan. Dengan kata lain, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dari suatu organisasi, semakin

besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa dari pengamatan penulis selama di lapangan sudah cukup baik dengan menggunakan buku petunjuk teknis pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana, serta melaksanakan Standart Operational Procedure (SOP) sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan sangat baik sesuai dengan indikator yang ada, hanya saja masih terdapat beberapa kendala bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Gowa. Beberapa kendala yang dihadapi yaitu kualitas sumber daya manusia yang masih kurang, keterbatasan anggaran, serta masih adanya masyarakat yang belum menyadari betapa pentingnya program keluarga berencana ini dan terkesan malu dan takut karena dipikiran masyarakat selalu hanya tentang alat kontrasepsi. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, mengalokasikan anggaran yang memadai dan juga melakukan sosialisasi bagi masyarakat yang berada di pelosok-pelosok yang terkesan kurang paham mengenai program keluarga berencana.

**Keterbatasan Penelitian.** Keterbatasan utama pada penelitian ini, yaitu waktu dan biaya penelitian

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari bahwa temuan penelitian ini masih awal. Sehingga penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa beserta jajarannya yang telah membantu penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Bakri, R., Sagrim, B., Rimba, A. S., & Jeddawi, M. (2020). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bone. *Pallangga Praja Volume 2, No. 2*, 139-148.

Miles, M. &. (1984). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

WHO. (2013). *Family Planning*.

Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional